



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Laporan ini berfungsi sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

1.3 Visi dan Misi

Visi dan Misi sesuai Renstra

BAB II: RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja pada tahun ini akan tidak lepas dari indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi target capaian instansi KPU di tahun 2026.

No	Sasaran Strategis (Renstra)	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2026	Alokasi Anggaran
1	Terwujudnya Pelayanan yang baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya layanan kepada public dengan baik	Indeks Pelayanan Publik	- Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelaksanaan penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	-
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	Terlaksananya persiapan dan proses pelaksanaan pendataan DPT berkelanjutan	Rp. 11.407.000

	ketentuan yang berlaku			sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga data pemilih yang diolah menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan daftar pemilih Pemilu dan Pemilihan Selanjutnya	
		Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan	
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan kapasitas legal drafting secara profesional dan mandiri bagi pegawai KPU Provinsi	Rp. 4.207.000
		Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Indeks Kualitas Kebijakan	- Terfasilitasinya penyelesaian sengketa hukum bagi Satker yang mengalami sengketa permasalahan hukum	
4	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sesuai ketentuan yang berlaku	- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk	-

	ketentuan yang berlaku	suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan		teknis atau edaran KPU	
		Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU			
5	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Tersedianya logistic dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Indeks Tata Kelola Logistik	Tidak ada tahapan	-
		Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan logistic Pemilu dan Pemilihan			
6	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih bagi kelompok pemilih pemula, kelompok marginal dan kelompok rentan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	Rp. 60.575.000
7	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	- Terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat Satker KPU Provinsi dengan baik, serta memperhatikan prioritas	Rp. 11.407.000

	Prasarana Kerja yang Memadai			kebutuhan Satker secara efektif dan efisien.	
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Indeks Sistem Merit KPU	- Terfasilitasinya dukungan kegiatan non operasional yang menjadi tugas fungsi KPU dalam memperkuat kelembagaan KPU serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan	
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Nilai SAKIP KPU	- Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian yang tertib, valid dan informatif	
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	- Terlaksananya internalisasi budaya kerja yang membangun integritas dan profesionalisme kerja di KPU	
		Terwujudnya integrasi data dan system informasi Pemilu yang baik	Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda		
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Indeks SPBE KPU		
		Meningkatnya tertib administrasi	Nilai Capaian Prioritas Nasional		

BAB III: RENCANA AKSI (ACTION PLAN)

Rencana Aksi merupakan langkah-langkah konkret/kegiatan untuk memastikan target pada Bab II tercapai.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Rencana Aksi (Tahapan Kegiatan)	Output	TARGET	Jadwal (Bulan/TW)			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum								
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelaksanaan penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	90%	√	√	√	√
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan kapasitas legal	100%	√	√	√	√

		dan pengelolaan SDM			
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai	Indeks Perencanaan Pembangunan		
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		
		Tersedianya data dan informasi Pemilih yang mutakhir	Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU		
		Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan baik	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Tepat Waktu		
		Terlaksananya persiapan pendataan DPT Berkelanjutan	Indeks Pengelolaan Aset		
		Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Tingkat Maturitas SPIP		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU	Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		
		Meningkatnya hasil pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Tingkat Digitalisasi Arsip		
		Terwujudnya penguatan kelembagaan organisasi KPU	Indeks Tata Kelola Pengadaan		

			drafting secara professional dan mandiri bagi pegawai KPU Provinsi - Terfasilitasinya penyelesaian sengketa hukum bagi Satker yang mengalami sengketa permasalahan hukum					
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	Terlaksananya persiapan dan proses pelaksanaan pendataan DPT berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga data pemilih yang diolah menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan daftar pemilih Pemilu dan Pemilihan	0				

			Selanjutnya Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan					
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	Tidak ada tahapan	100%	√	√	√	√
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	-Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU	0%				
1. 1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan								
	Terlaksananya pengelolaan,	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi	Tidak ada Tahapan	100%	√	√	√	√

	pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat						
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	Tidak ada Tahapan	0%				
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	Tidak ada Tahapan	100%	√	√	√	√
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan								
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diuji Publik dengan Tepat Waktu	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk	2 rancangan	√	√	√	√

			teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan					
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan	100%	√	√	√	√
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan	100%	√	√	√	√
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan	100%	√	√	√	√

3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih								
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih bagi kelompok pemilih pemula, kelompok marginal dan kelompok rentan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	10 Lembaga	√	√	√	√
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih bagi kelompok pemilih pemula, kelompok marginal dan kelompok rentan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	100%	√	√	√	√
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih bagi	100%	√	√	√	√

	dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	kelompok pemilih pemula, kelompok marginal dan kelompok rentan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan					
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan								
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan kapasitas legal drafting secara professional dan mandiri bagi pegawai KPU Provinsi - Terfasilitasinya penyelesaian sengketa hukum bagi Satker yang mengalami sengketa	0%				

			permasalahan hukum					
		Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan kapasitas legal drafting secara professional dan mandiri bagi pegawai KPU Provinsi - Terfasilitasinya penyelesaian sengketa hokum bagi Satker yang mengalami sengketa permasalahan hukum	100 Satker	√	√	√	√
		Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU	0%				

			- Terlaksananya pembinaan kapasitas legal drafting secara professional dan mandiri bagi pegawai KPU Provinsi - Terfasilitasinya penyelesaian sengketa hokum bagi Satker yang mengalami sengketa permasalahan hukum					
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal								
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan kapasitas legal drafting secara professional dan mandiri bagi pegawai KPU Provinsi	552 Lembaga	√	√	√	√

			- Terfasilitasinya penyelesaian sengketa hukum bagi Satker yang mengalami sengketa permasalahan hukum					
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan kapasitas legal drafting secara professional dan mandiri bagi pegawai KPU Provinsi - Terfasilitasinya penyelesaian sengketa hukum bagi Satker yang mengalami sengketa permasalahan hukum	69.125 Orang	√	√	√	√
B. Program Dukungan Manajemen								

	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis atau edaran KPU - Terlaksananya pembinaan kapasitas legal drafting secara professional dan mandiri bagi pegawai KPU Provinsi - Terfasilitasinya penyelesaian sengketa hukum bagi Satker yang mengalami sengketa permasalahan hukum	85		√		√
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	-Terfasilitasinya dukungan kegiatan non operasional yang menjadi tugas fungsi KPU dalam memperkuat kelembagaan KPU serta	100%	√	√	√	√

			kegiatan lainnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	-Terfasilitasinya dukungan kegiatan non operasional yang menjadi tugas fungsi KPU dalam memperkuat kelembagaan KPU serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan	100%	√	√	√	√
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	-Terlaksananya internalisasi budaya kerja yang membangun integritas dan profesionalisme kerja di KPU	WTP				√
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU		B				√

		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		92				√
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku		100%		√		√
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensi		96%		√		√
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU		100%	√	√	√	√
1. Pengelolaan Keuangan								
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku		100%	√	√	√	√
	Terlaksananya sistem akuntansi	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi		2 Laporan		√		√

	dan pelaporan keuangan dengan baik	dan Pelaporan Keuangan						
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		1 Laporan				√
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan		95%	√	√	√	√
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)		95%	√	√	√	√
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi /analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU		2 dokumen	√	√	√	√
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan		100%	√	√	√	√

		Anggaran dengan Tepat Waktu						
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu		100%	√	√	√	√
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan		90%	√	√	√	√
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi								
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku		100%	√	√	√	√
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU		10 Lembaga	√	√	√	√
	Terwujudnya Penguatan	Indeks Reformasi Birokrasi		85				√

	Kelembagaan Organisasi KPU							
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik		100%	√	√	√	√
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu		1 laporan	√	√	√	√
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia								
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu		100%	√	√	√	√
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel		100%	√	√	√	√
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan		100%	√	√	√	√

	Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku						
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update		100%	√	√	√	√
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik		100%	√	√	√	√
	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Transparan dan Akuntabel		100%	√	√	√	√
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana								
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai		100%	√	√	√	√
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi		10%	√	√	√	√

		dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja		100%	√	√	√	√
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU		100%	√	√	√	√
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU		100%	√	√	√	√
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU		100%	√	√	√	√
	Terlaksananya Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU		100%	√	√	√	√
5. Pemeriksaan Internal KPU								
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal						

		terhadap Realisasi Anggaran						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti		80%	√	√	√	√
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti		79%	√	√	√	√
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU		WTP	√	√	√	√
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP		77	√	√	√	√
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal		50 org	√	√	√	√
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara								
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU		100%	√	√	√	√

		dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara						
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material		100%	√	√	√	√
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)		1 Laporan	√	√	√	√
7. Pengelolaan Data dan Informasi								
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir		553 Satker	√	√	√	√
	Terwujudnya	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi,		100%	√	√	√	√

	Penerapan eGovernment secara Tepat	dan KPU Kabupaten/Kota yang Menerapkan eGovernment sesuai SOP yang Berlaku						
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai		100%	√	√	√	√
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia								
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada		553 satker	√	√	√	√
		Persentase Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan		20%	√	√	√	√

		Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun						
		Persentase Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia		0,5%	√	√	√	√
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu								
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan		100%	√	√	√	√
10. Pendataan DPT Berkelanjutan								
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan		553 Satker	√	√	√	√
	Terlaksananya	Jumlah Satker KPU,		553	√	√	√	√

	Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait		satker				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Rencana Aksi Kinerja**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat Provinsi secara tepat, cepat dan akurat sesuai ketentuan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat dan akurat sesuai standar layanan informasi	100%
2	Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan penyuluhan hukum yang baik	100%
3	Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian kebijakan regulasi KPU di Tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota secara patuh hukum dan minim sengketa (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU secara patuh dan tidak menimbulkan sengketa hukum	100%
4	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Provinsi dengan Lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Jumlah Lembaga di Tingkat Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Provinsi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	4 Lembaga
5	Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi secara cepat, akurat dan sesuai ketentuan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terlaksananya sosialisasi Pendidikan pemilih kepada Masyarakat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemanfaatan media yang tersedia (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	100%
7	Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	Persentase layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi	100%

	Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	
8	Terlaksananya fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan pemilih di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang telah melaksanakan kegiatan Pendidikan pemilih	100%
9	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku oleh pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya	100%
10	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan	2 Laporan
11	Tersusunnya dan tersampainya laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara tepat waktu sesuai ketentuan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	100%
12	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara tepat waktu sesuai ketentuan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	100%
13	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai ketentuan perencanaan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
14	Terwujudnya koordinasi dan	Jumlah Lembaga di	4 Lembaga

	Kerjasama kelembagaan KPU Provinsi dengan Lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Tingkat provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang melakukan Kerjasama dengan KPU Provinsi dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	
15	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai kebijakan KPU (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang memenuhi komponen Reformasi Birokrasi sesuai pedoman KPU	80
16	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melakukan pelayanan publik secara baik	100%
17	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara akuntabel dan tepat waktu (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi secara akuntabel dan tepat waktu	4 Laporan
18	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi and KPU Kabupaten/Kota (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	100%
19	Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase jumlah anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang pelaksanaan PAW-nya sesuai ketentuan yang berlaku	100%
20	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang valid dan update (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang disediakan secara valid dan update	100%
21	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi	100%

	wilayahnya yang baik dan memadai sesuai standar (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang baik dan memadai	
22	Terwujudnya sarana dan prasarana kerja melalui Pembangunan dan/atau renovasi Gedung dan Gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang tepat waktu dan berdaya manfaat (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Pesentase Gedung dan Gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai	100%
23	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai kebutuhan kerja (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang memenuhi kebutuhan kerja	100%
24	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi	100%
25	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Provinsi	95%
26	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Provinsi	100%
27	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase jumlah pengaduan Masyarakat pada KPU Provinsi yang ditindaklanjuti	100%
28	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Provinsi yang ditindaklanjuti	100%
29	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan KPU Provinsi sebagai kontribusi terhadap opini BPK KPU (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase laporan keuangan KPU Provinsi yang disusun tepat waktu, andal dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	WTP

30	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem pengendalian intern Pemerintah pada KPU Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi	80
31	Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi secara tertib, efisien dan akuntabel (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
32	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Provinsi yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100%
33	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Provinsi berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Jumlah Laporan Barang Milik Negara KPU Provinsi berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan
34	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Jumlah Penyediaan data dan informasi secara valid	34 Satker
35	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%
36	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang terintegrasi dan memadai (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai	100%
37	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Provinsi melalui media kompetensi yang tersedia (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	100%
38	Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan system informasi Pemilu dan	Persentase system informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan	100%

	Pemilihan di Tingkat Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	didukung KPU Provinsi sesuai ketentuan	
39	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di Tingkat Provinsi (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	34 Satker
40	Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di Tingkat Provinsi Bersama pihak terkait (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan Bersama pihak terkait	34 Satker
41	Terlaksananya Layanan Administrasi Data Autentifikasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Tahun 2024 tepat waktu dan sesuai aturan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase Layanan Administrasi Data Autentifikasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Tahun 2024 tepat waktu dan sesuai aturan	100%
42	Terlaksananya Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 (Penugasan dari Perjanjian Kinerja (Renstra))	Persentase Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	100%

Program

Anggaran

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp. 22.904.852.000 |
| 2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 76.189.000 |

Medan, 09 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara

Sapran Daulay